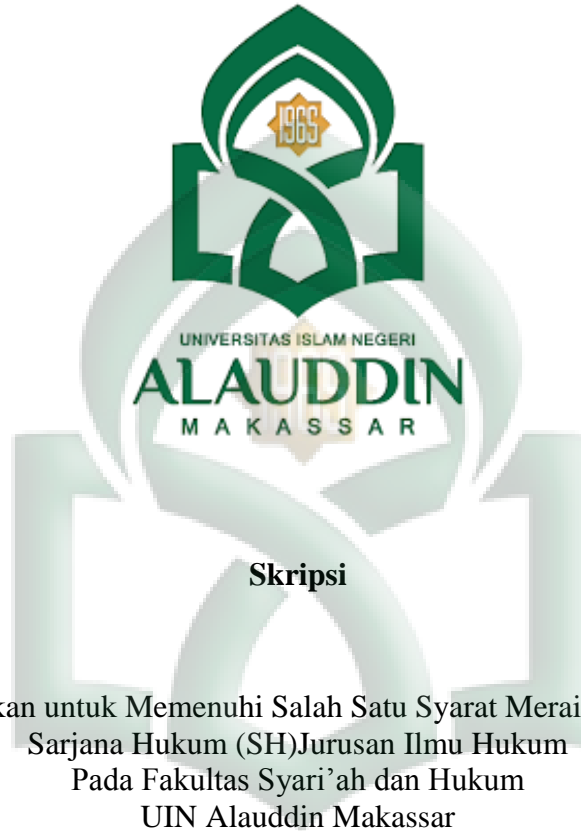


**ANALISIS PUTUSAN NAFKAH TERUTANG SUAMI TERHADAP ISTRI
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

HANIFAH ALYA
NIM. 10400114309

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hanifah Alya
Nim : 10400114309
Tempat/Tgl Lahir : Sungguminasa, 22 Mei 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/S1
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 104/116
Judul : Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.

Samata, 15 Mei 2018

Penyusun

Hanifah Alya

10400114309

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Agama Makassar” yang disusun oleh **Hanifah Alya**, NIM: 10400114309, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 M, bertepatan dengan 29 Sya’ban 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 15 Mei 2018 M
29 Sya’ban 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Erlina, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Drs. H. Munir Salim, M.H	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum,

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis selalu semangat dan kuat dalam menyelesaikan karya ilmiah penulisan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN NAFKAH TERUTANG SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”, yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Makassar. Salam dan Shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga yang tercinta dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau.

Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Makassar.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada orang-orang yang peneliti cintai dan mencintai peneliti atas kerja keras yang telah diberikan dengan penuh kasih sayang dan tanggungjawab kepada peneliti selama ini. Serta saudara-saudari peneliti yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun waktu, ilmu dan mengajarkan arti keluarga kepada peneliti. Semoga Allah swt mengampuni dosa-dosa kita, meringankan azab kubur kita, menjauhkan kita dari siksa api nerakanya, dan menjadikan kita sebagai golongan hamba-hamba yang diridhoinya. *Amin AllahummaAmin*

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar selaku pimpinan tertinggi.
2. Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan para wakil dekan yang selalu memberikan waktunya untuk memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Istiqamah, S.H, M.H., dan Rahman Syamsuddin, S.H, M.H., masing-masing selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk dengan pengurusan akademik sehingga penyusunan lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
4. Istiqamah, S.H., M.H., dan Drs. H. Munir Salim M.H., masing-masing selaku pembimbing penyusunan yang telah memberikan banyak pelajaran dan petunjuk berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang penulis cintai dan hormati Bapak Ir. Andi Patonangi dan Alm Hj. Rosdiana yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya sejak lahir hingga dewasa ini, mengajarkan arti hidup, memberikan segalanya untuk memenuhi segala kebutuhan penulis sejak kecil hingga

saat ini, semua jasa orang tua yang telah membiayai pendidikan penulis sampai perguruan tinggi, yang dengan penuh perhatian mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua jasa-jasanya yang tidak akan mampu penulis tuliskan dalam kata pengantar ini, karena begitu banyak pengorbanan yang dilakukan kedua orang tua penulis. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan membalas semua yang telah diberikan kepada penulis.

6. Adik dan keluarga yang telah memberikan dukungan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis tidak bisa memberikan apa-apa tetapi penulis hanya bisa memohon kepada Allah swt memberikan kemurahannya kepada mereka.
7. Terima kasih kepada NurHijrah yang selalu menemani mengurus penelitian penulis.
8. Terima kasih kepada Aswar Amin Syamsiyang selalu memberikan dukungan dan semangatnya selama ini mulai dari awal pembuatan skripsi hingga akhir.
9. Terima kasih kepada Angraeni Rusli, Megawati Mas'ud, Jusnaedi, Nur Pratiwi Amir yang selalu ada untuk mendukung, membantu dan menyemangati dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Muthiah Awwaliyah, St. Mutmainna, sahabat penulis mulai awal kuliah hingga sekarang yang selalu memberikan semangat.

11. Teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya kelas Ilmu Hukum G yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa sebagai hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan, dalam penulisan skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan, kesalahan, serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun diharapkan dari berbagai pihak. Semoga tulisan kecil ini bermanfaat.

Samata, April 2018

Penyusun,

Hanifah Alya

NIM. 10400114309



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10-33
A. Nafkah	10
1. Pengertian Nafkah.....	10
2. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah	12
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	18
1. Hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang ..	18
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam agama.....	23
3. Hak dan kewajiban suami istri dalam adat.....	25
C. Putusan	27
1. Pengertian Putusan	27
2. Macam-macam putusan Pengadilan	29

BAB III	METODE PENELITIAN.....	34-36
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian	34
1.	Jenis Penelitian.....	34
2.	Lokasi Penelitian.....	34
B.	Pendekatan Penelitian	35
C.	Sumber Data.....	35
D.	Metode Pengumpulan Data.....	35
E.	Instrumen Penelitian.....	36
F.	Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37-53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B.	Nafkah Terutang Suami terhadap Istri dalam perspektif Hukum Positif	39
C.	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....	41
BAB V	PENUTUP.....	54-55
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

ABSTRAK

Nama : Hanifah Alya

Nim : 10400114309

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar

Kelalaian seorang suami menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya merupakan sikap yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Fenomena ini biasa terjadi di masyarakat dan tentunya memberikan konsekuensi karena telah meninggalkan salah satu akibat hukum dari pernikahan. Hukum telah mengatur dan memberikan perlindungan salah satu akibat hukum bagi suami yang melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar. Hal ini dilatar belakangi bagaimana seorang suami bisa melalaikan kewajibannya memberikan nafkah terhadap istri.

Penulis mencoba mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana untuk Mengetahui dan menganalisis Hukum terhadap Nafkah Terutang Suami terhadap Istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui pertimbangan hakim.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yaitu: 1) Pendekatan Kasus dan Undang-Undang di Pengadilan Agama Makassar, 2) Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Makassar, 3) Analisis data. Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.

Setelah menjelaskan tentang hukum terhadap nafkah terutang suami terhadap istri, maka pelaksanaannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Adanya pemberian nafkah terhadap istri sangat jelas di atar dalam Pasal 34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Undang-Undang telah mengakomodir aturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan seperti mengharuskan suami untuk memenuhi hak-hak istri untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik

Sementara putusan hakim menghukum tergugat lebih besar dan lebih tinggi lagi nominalnya dari apa yang telah di putusan oleh majelis hakim. Karena pertimbangan selama ini nominal gaji Tergugat I sangat besar. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada pihak termasuk dalam hal ini pemohon oleh istri untuk menuntut haknya dari kelalaian suami.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar belakang*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal.³

Keluarga harus terbentuk dari pondasi yang kokoh. Pondasi tersebut adalah akidah Islam, ikatan atas dasar keutamaan agama (dien). Dengan niat, cara, proses pernikahan yang sesuai dengan syariat islam, maka restu akan menjadi doa dari semua yang menyaksikan ikatan tersebut. Maka sakinah, mawaddah, dan marohmah mudah dicapai. Oleh karena itu, kalau seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenankannya, karena itu

¹Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h. 88.

³Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h. 5.

perkawinan yang bersifat sementara hanya untuk bersenang-senang saja., seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahilityah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, di larang oleh Nabi Muhammad SAW⁴. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci yang hanya hendak dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci. Hak-hak keluarga adalah hak yang timbul dari hubungan keluarga, terutama kekuasaan marital, yakni kekuasaan suami atas istrinya.

Adanya suatu perkawinan, maka akan timbul akibat-akibat hukum bagi suami maupun istri, serta bagi anak apabila didalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak.⁵

Dengan selesai dan sahnya suatu akad pernikahan, maka timbul amanat dan kewajiban yang suci dan mulia di pundak suami dan istri secara bersama dan seimbang, yaitu bersama-sama bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup bersama, membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, mendidik putra dan putri kesayangannya, serta melindungi dan memelihara kelestarian kehidupan rumah tangga dan keturunannya.⁶

Kewajiban seorang istri, yang merupakan hak-hak bagi suami pada pokoknya adalah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami. Sedangkan seorang suami pada dasarnya berkewajiban untuk

⁴R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Ctk, 9: Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 97.

⁵Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta:Rajawali Pers 2011), h. 139.

⁶Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinandi Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta 1976), h. 66.

memenuhi tiga kebutuhan pokok dalam rumah tangga, yakni sandang, pangan, dan papan.

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari pelaksana syariat islam. Dari keluargalah lahir generasi yang kuat akidah dan akhlaknya untuk mewujudkan kembali islam sebagai sebuah negara.⁷ Maka, disaat negara islam belum terwujud, maka menjadi kewajiban setiap pasangan untuk menjaga kekokohan keluarga tersebut. Agar islam dalam institusi terkecil tersebut tidak mampu dihancurkan kaum kafir yang tidak pernah ridho dengan kekuatan islam sampai islam tegak kembali menjadi negara. Untuk, itu menjadi kewajiban untuk melanggengkan sebuah ikatan pernikahan dan kehidupan keluarga yang selalu terikat dengan hukum Allah swt. Hak-hak keluarga adalah hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga, terutama kekuasaan marital, yakni kekuasaan suami atas istrinya.⁸

Berketurunan merupakan tujuan pokok di antara pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya. Islam melihat keturunan bagian dari nikmat-nikmat yang menyenangkan kehidupan dan mencapai kebahagiaan. Ia merupakan nikmat yang menurut pujian. Keinginan yang mengharuskan kekuasaan. Oleh karena, Al-Qur'an mengancam bagi orang yang memintanya kemudian mengingkari rezekinya dan tidak bersyukur .

Ketika orang tua merasakan kelelahan dan kesulitan dalam menanggung anak-anaknya, dan berbagai dengan mereka, jiwa-jiwa mereka tidak kering

⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, (cet 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 352.

⁸Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014), h. 189.

dengan kecintaan dan kerinduan mereka⁹. Oleh karena itu, islam telah menjadikan orang tua bertanggung jawab pada anak dan mempersiapkan perlengkapan baginya demi kelangsungan hidup dan perkembangannya, dengan dasar bahwa anak adalah titipan yang dipercayakan Allah swt untuk dipelihara dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

Cinta orang tua terhadap anak bagian dari sifat nalurinya, dibalik rasa cinta terhadap anak, orang tua mempunyai pengharapan, semoga mereka menjadi anak yang saleh dan sholehah berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa, dan bangsa.

Harapan seperti ini bisa saja sirna begitu saja ketika tidak didasari dengan pembentukan dan pembinaan rumah tangga yang baik dan Islami, sementara keluarga yang seperti itu hanya bisa terbentuk dengan adanya ikatan kuat yang bisa menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga ini, Allah swt menjadikan nasab sebagai sarana utamanya. Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan Allah swt. Nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.

⁹Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga*. Terj. Nur Khozin, (cet 1; Jakarta: Amzah 2010), h. 103.

Berkaitan dengan status-status nasab yang merupakan hak bagi seorang istri, doktrin para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf/ yang patut atau wajar, hal ini didasari oleh firman Allah Qs. Al-Baqarah/2:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Terjemahnya

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.¹⁰

Nafkah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah dilangsungkannya pernikahan, hal ini diwajibkan karena dengan terpenuhinya nafkah maka keberlangsungan kehidupan membina rumah tangga dapat terjaga. Dalam syariat islam nafkah haruslah diberikan sejak awal setelah akad dan diucapkan

Pada kenyataannya masih ada suami yang melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya, padahal itu sudah kewajiban seorang suami setelah melangsungkan pernikahan sebagai kepala rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) suami istri wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 2010).

- 3) Jika suami atau istri melalikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai meninggalnya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkehendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan pernikahan tetap dianjurkan, maka kemudratan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Membiayai dan menanggung istri adalah sudah kewajiban dasar dari seorang suami sebagai kepala keluarga.¹¹

Dari beberapa uraian tersebut, maka dianggap perlu melakukan penelitian **“ANALISIS PUTUSAN NAFKAH TERUTANG SUAMI TERHADAP ISTRI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, penelitian memfokuskan penelitiannya mengenai faktor-faktor nafkah terutang ayah pada anak dalam perspektif hukum positif serta pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar.

¹¹Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak <https://media.neliti.com/media/publications/34349-ID-pelaksanaan-kewajiban-pemeliharaan-anak-alimentasi-oleh-orang-tua-pasca-putusan.pdf> pada tanggal 14Oktober2017 pukul 22:30.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokoknya adalah yang dibatasi Analisis putusan Nafkah Terutang Suami terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar, dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nafkah terutang suami pada istri dalam perspektif hukum Positif?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan nafkah terutang suami terhadap istri?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran diatas, tidak di temukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum perkawinan Indonesia yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan, hak dan kewajiban dalam hukum adat, dan hak dan kewajiban dalam hukum agama, namun dalam bukunya tidak membahas tentang sanksi apabila melanggar kewajibannya.

Munir Fuady dalam bukunya Konsep Hukum Perdata yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, namun dalam bukunya tidak membahas tentang sanksi apabila melanggar kewajibannya.

Diah Ardian Nurrohmi dalam skripsinya Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 932/Pdt.G/2007/PA.Bi), dalam skripsi ini hanya membahas bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang biaya pemeliharaan hadhanah

Dengan demikian dari melihat beberapa buku yang ditemukan diatas tidak satupun yang membahas mengenai Analisis Putusan Nafkah Terutang Suami Terhadap Istri di Pengadilan Agama Makassar.

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa suatu karya ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai oleh penulisnya, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui nafkah terutang suami pada istri dalam perspektif hukum positif
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan nafkah terutang suami terhadap istri

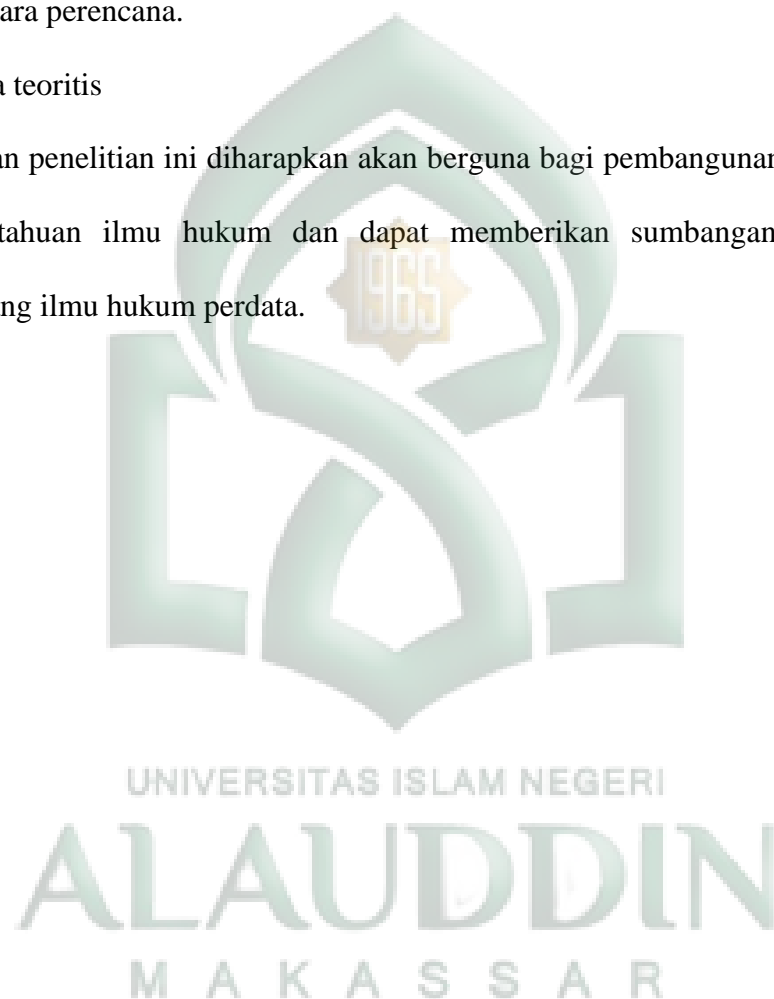
2. Kegunaan yang diharapkan penyusun dari penelitian ini adalah:

a. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti di bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana.

b. Secara teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembangunan pemikiran pengetahuan ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangan tambahan dibidang ilmu hukum perdata.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Nafkah*

1. Pengetian Nafkah

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh Undang-Undang ini terhadap suami adalah memberikan Nafkah.

Kata “*Al-Nafaq*” berarti habis. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal¹². Kata nafaqa dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian sesuatu yang dibelajarkan oleh seorang laki-laki pada keluarganya. Hal itu disebut dengan nafaqah, karena hal itu mengandung permusnahan harta yang dibelajarkan untuk mereka. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.¹³

Nafkah menurut istilah *Fuqaha* ialah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu. Dalam istilah mereka kata

¹²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), h. 141.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Aldgensido1986), h. 421.

nafaqah digunakan pada makanan saja. Mereka mengatakan: laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya. Hanya saja penggunaan semacam itu merupakan majaz. Sedangkan hakikat yang syar'i adalah pengertian yang pertama. *Al-Nafakah* merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan *Al-Qur'an*, *al-sunnah* dan *ijma'* ulama'. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, dan kediaman bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.¹⁴

Beberapa ulama telah memberikan perincian hal-hal penting yang harus diberikan sebagai nafkah. Hal-hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka. Merupakan tanggungjawab seorang ayah menafkahi puteri-puterinya sampai mereka usia puber. Begitu pula kewajiban seorang muslim untuk menafkahi orangtuanya serta kakek neneknya. Kalau dia mampu melakukan hal itu. Bila memungkinkan dan memiliki harta, maka dia sepatutnya memperhatikan kebutuhan kerabat-kerabatnya yang miskin.

¹⁴A. Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja Grafindi Persada 2002), h. 267.

2. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Ada beberapa sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yakni:

a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW. Dia berkat, “Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah selain yang lagi ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu menudaratkan saya?” jawab beliau “Ambil olehmu dan hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”.

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu dan bapaknya apabila kedua tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal perkas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami.

c. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi binatang itu, dan dia wajib menjaganya sampai diberi beban lebih dari semestinya.

d. Dasar Hukum Nafkah

Anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemarahan (nasab) dengan ayahnya.¹⁵ Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang risalah peradaban bangsa ini.

Suami atau bapak dalam menafkahi anaknya tentu saja hingga hingga seluruh anak-anaknya itu mencapai usia aqil baligh dan telah mampu menafkahi diri mereka sendiri dan khusus bagi anak-anak yang wanita, maka kewajiban menafkahi mereka adalah hingga mereka mereka.

Ada beberapa pendapat mengenai nafkah anak, antara lain sebagai berikut:

1. Kata Abu Hanifah, nafkah anak lelaki yang telah besar dalam keadaan sehat, tidak dipikul oleh ayahnya. Tetapi nafkah anak perempuan, tetap dipikul oleh ayahnya sebelum anak tersebut bersuami.
2. Kata Ibnu Malik, nafkah anak perempuan tetap dipikul oleh ayahnya sampai dia mempunyai suami atau sudah menikah.
3. Kata Ahmad, anak yang telah besar, kalau tidak mempunyai harta usaha, nafkahnya tetap dipikul oleh ayahnya. Dan nafkah untuk yang sampai umur dalam keadaan sakit, nafkahnya dipikul orang tuanya. Hukum ini

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta: Grafindo, 1995), h. 76.

telah disepakati, setelah sembuh dari sakit hilanglah tanggung jawab ayahnya. Tetapi kalau kembali sakit, nafkahnya kembali pulapada ayahnya.

Dasar dari nafkah adalah perkawinan, hubungan dan kewajiban perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwalandasan pemberian nafkah adalah perkawinan, hubungan, dan perjanjian. Atas hal ini perkawinan bukan satu-satunya dasar pemberian nafkah. Hubungan baik bersifat kekerabatan ataupun persahabatan bisa menjadi landasan lain tentang hak pemberian nafkah kepada orang lain.

Begitu pula perjanjian yang dilakukan secara formal berimplikasi hukum bahwa seseorang atau lembaga dapat memberikan nafkah kepada pihak lain. Hal itu dapat dimaklumi bahwa ketiga kategori sebagai dasar pemberian nafkah saling berkaitan satu sama lain. Artinya pemberian nafkah tidak berhenti hanya karena seseorang berpisah dengan pasangannya. Hak nafkah dapat berlangsung kepada anak sebagai buah dari perkawinan.¹⁶

Apabila anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda apabila anak yang telah dewasa mencapai umur dapat bekerja tatapi terhalang untuk bekerja karena

¹⁶Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 10.

sakit atau kelemahan-kelemaahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anaknya itu.¹⁷

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi cagak hidupnya, tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepada seperti pada waktu belum kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu dan anak-anaknya berkemampuan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.

Mengingat, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yang bersumber dari hadits Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu *haji wada'* :

اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن

بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن

¹⁷AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Pers, 1977), h. 61.

ذَٰلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Takutlah kepada Allah terkait perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan kalimat (ikatan perjanjian) Allah dan kemaluan (*faraj*) mereka dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah. Hak kalian yang harus mereka penuhi adalah mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai berada di ranjang kalian. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras (sebagai pelajaran). Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.” (HR. Muslim).

e. Syarat-syarat wajib nafkah

Syarat-syarat wajib nafkah antara lain sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Mampu
3. Islam

Seperti telah disebutkan diatas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
- c. Kadar Nafkah Anak

¹⁸Tihami, Fiqih Munakat, *Kajian fiqh nikah* lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 169.

Terutang ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur batas-batasnya hanya diatur secara umum menurut kemampuan suaminya. Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah kepada istri atau anak-anaknya, maka perlu diperhatikan beberapa hal:¹⁹

Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi istri dalam memelihara dan mencegah anak-anaknya dan disesuaikan dengan keadaan kemampuannya, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun, pendidikan anaknya:

1. Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika suami membutuhkan atau dengan cara yang ditentukan waktunya.
2. Sebaiknya ukuran nafkah itu, didasarkan kepada kebutuhan pokok dan pendidikan anaknya, dan hal ini disesuaikan berdasarkan keadaan perekonomian dimasyarakat.

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi istri atau anak pada waktu perkawinan atau setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan:

- a. Kemampuan suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak baik pada waktu perkawinan atau perceraianya, istri tidak dituntut untuk membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.

¹⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 126.

b. Tidak Kikir dan Berlebihan

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri dan anaknya tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dalam hal ini hakim boleh memutuskan beberapa kadar jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri dan anaknya, serta suami mengharuskan membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dionysrkan istrinya ternyata benar.

B. Hak dan kewajiban Suami istri

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

Yang di maksud dengan “hak” ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan “kewajiban” ialah sesuatu yang harus dilakukan atau di adakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak lain.

Di dalam KUH Perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing Cina tentang Hak-Hak dan Kewajiban suami dan istri diatur dalam Bab V pasal 103-118 KUH Perdata dimulai dengan kaidah pasal 103 bahwa “suami dan istri harus setia satu sama lain, tolong-menolong dan bantu membantu”. Pasal 104 berbunyi “Dengan terikatnya suami dan istri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak”. Pasal 105 berbunyi “kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami istri”

Apabila KUH Perdata bertitik tolak dari hubungan perdata suami istri semata, maka lain halnya dengan UU No 1 Tahun 1974 pasal 30 berbunyi:

“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.²⁰

Betapa idealnya undang-undang nasional yang digenggam dalam UU No. 1 Tahun 1974 untuk membina kehidupan rumah tangga suami istri dan keluarga/rumah tangga yang modern sebagai sendi dasar dari susunan masyarakat Indonesia yang modern. Hukum perkawinan nasional, tersebut sudah menjangkau hari depan di mana keluarga/rumah tangga bangsa Indonesia bersifat keorngtuaan (parental) menyisihkan kekeluargaan yang bersifat patrilineal dan martilineal.²¹

Undang-undang nasional tersebut nampaknya sesuai dengan perkembangan keluarga Indonesia modern yang sudah dapat melepaskan diri dari pengaruh kekerabatan, dan nampaknya tidak sulit diterapkan kepada masyarakat keluarga yang susunannya bersifat keorngtuaan seperti berlaku di kalangan masyarakat jawa dan sebagian keluarga-keluarga melayu. Tetapi bagi masyarakat yang susunan kemasyarakatannya masih terikat dengan hubungan kekerabatan yang patrilineal atau matrilineal dan juga bilateral, begitu pula bagi masyarakat yang

²⁰Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h. 85.

²¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju,2003), h. 111.

dipengaruhi konsepsi kekeluargaan agama Islam yang lahir di tanah Arab itu, maka hukum perkawinan nasional itu masih diambang pintu peralihan.

Tetapi tidak berarti bahwa sejak adanya UU No. 1 Tahun 1974 tidak terjadi pergeseran budaya hukum dan hukum adat dan hukum agama ke arah mendekati dan mengikuti perubahan zaman dan perubahan nilai budaya. Justru karena adanya pergeseran itulah maka kita perlu mengetahui bagaimana kedudukan suami istri menurut hukum agama dan hukum adat, untuk menjadi hukum kerangka acuan dalam melakukan penelitian yang berlaku dalam masyarakat.

Misalnya saja dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 30 ayat 3 dikatakan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” atau di dalam KUH Perdata pasal 105 ayat 1 dikatakan “suami adalah kepala rumah tangga dalam persatuan suami istri”. Sebagaimana juga dikatakan Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987: 97) bahwa pasal-pasal tersebut berbeda dengan hukum adat serta hukum Islam, malahan bisa dikatakan tidak sesuai jika keluarga/rumah tangga tersebut sama dengan budaya Barat yang individualistik dan materialistik, jauh sama sekali dari ikatan kekerabatan dan ikatan ketetanggaan.

Tetapi tidak berarti bahwa sejak adanya UU No. 1 Tahun 1974 tidak terjadi pergeseran budaya hukum dari hukum adat dan hukum agama ke arah mendekati dan mengikuti perubahan zaman dan perubahan nilai budaya.

Di antara hak, kewajiban dan kedudukan suami yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya.

2. Suami adalah cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
4. Suami (bersama-sama dengan istri) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
5. Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai istri.²²
6. Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain, dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Sedangkan di antara hak, kewajiban dan kedudukan dari istri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

- a. Istri mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
- b. Istri juga cakap berbuat, artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam sistem KUH Perdata (yang berasal dari Belanda), hanya suami yang dianggap cakap berbuat, sedangkan istri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.
- c. Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

²²Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 19.

- d. Istri (bersama-sama dengan suami) berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- e. Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatas pada dasarnya mengandung persamaan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Islam.

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir dan batin seorang kepada yang lain.

23

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. suami wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Mengenai ayah yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU PKDRT”). Dalam Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT diatur bahwa:

“setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta”.²³

2. Hak dan kewajiban Suami Istri dalam Hukum Agama

Menurut hukum Islam, istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana Allah swt berfirman: ‘Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik’, kemudian dalam hadis Tarmizi. Rasulullah SAW mengatakan:

“orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada istri”.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis itu, maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya.

²³setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta (lihat Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat [1] UU PKDRT www.hukumonline.com pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 22:10.

Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Qur'an bahwa 'pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (istri) (Q. IV : 34) dan 'wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari istrinya' (Q. II: 228). Dengan demikian menurut islam tidak semua hal kedudukan suami dan istri itu seimbang., harus dilihat pada fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin (qawwamun) dari keluarga/rumah tangga, sedangkan wanita (istri) tidak sejauh itu. Suami adalah Kepala Keluarga/rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga/rumah tangga, suami adalah pelindung bagi keluarga/rumah tangga bukan saja dalam arti perbedaan, tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga/rumah tangga. Sedangkan istri fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga/rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan istri adalah pendamping dan pembantu suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan kedudukan istri adalah seimbang.

Kemudian sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Muslim menyatakan bahwa Nabi SAW berkata: "Manusia yang sangat buruk (perainganya) pada sisi Allah dihari kiamat, ialah pria (suami) yang bercampur dengan dia, dan istri bercampur dengan dia, kemudian menyiarkan rahasia istri (dan suami) itu. Jadi menurut

ajaran Islam dilarang keras membeberkan keluar rahasia keluarga/rumah tangga, apalagi rahasia di tempat tidur”.²⁴

3. Hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum adat

Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) ataupun yang beralih-alih, kewajiban untuk menegakkan keluarga/rumah tangga (Suami-Istri) bukan semata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya immaterial dan tidak langsung berupa perhatian atau pengawasan. Apalagi jika yang ditegakkan itu keluarga/rumah tangga yang masih baru dengan suami istri yang berumur muda.

Disamping itu berdirinya keluarga/rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan poligami, perkawinan ganti tikar (levirat). Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan dan istri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak seimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga/rumah tangga.

Didalam bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur yang mempertahankan keturunan menurut garis lelaki dimana istri setelah perkawinan masuk dalam

²⁴Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 116.

kerabat suami, walaupun juga orang Bali yang tidak mengenal jujur, maka hak dan kewajiban suami istri berbeda, hak dan kedudukan istri lebih rendah dari hak dan kedudukan suami. Istri harus tunduk dan patuh kepada suami dan kerabatnya, segala sesuatunya diselesaikan dengan musyawarah keluarga/kerabatnya. Istri hanya pendamping suami, membantu suami dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan hubungan kekerabatan atau dalam pergaulan masyarakat (adat). Itupun jika istri berkedudukan sebagai istri ratu bagi orang yang lebih dari satu istri.

Jika istri hanya berkedudukan sebagai penunggu ladang, jika istri kurang pendidikan dan pergaulannya, jika istri tidak mendapat hak untuk bergaul berdampingan dengan suami, karena bentuk perkawinannya ‘maggih kaya’, karena istri berasal dari ‘kemenakan dibawah lutui’, karena istri adalah istri ‘beduwa’ (sesan: bawaan), maka ia tidak berhak mendampingi suami dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adakalanya bukan saja karena ada setempat yang tidak membolehkan, tetapi juga memang kenyataannya dikarenakan istri kurang pendidikan dan pengalamannya.

Hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan keadaan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik istri maupun suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Istri bebas berbelanja ke pasar, istri melakukan jual beli, berdagang keliling, menunggu kedai, bekerja di kantor, menjadi guru, menjadi kepala desa, bahkan menjadi angkatan bersenjata, tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta kekayaan adat, bangunan adat, mengenai harta kekayaan, bangunan adat, tanah kerabat, tanah

adat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri, tanpa persetujuan suami, tanpa persetujuan kerabat.

Memang suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, serta dan memberi bantuan lahir batin yang satu hubungan kekerabatan. Begitu pula dalam hal kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tidak terlepas kaitannya dengan rumah tangga saudara-saudaranya yang lain.²⁵

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Peranan hakim dalam aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya sehubungan bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtssecherheit*). Ketiga hal ini harus mendapatkan perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru

²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 114.

menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.²⁶

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Dalam literatur yang lain dikemukakan bahwa putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan panitera (Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diucapkan oleh hakim dalam

²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradilan Agama*, (cet V; Jakarta: Kencana, 2008), h. 291.

sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) R.Bg mewajibkan para hakim untuk megadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan R.Bg. Kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam Pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan

a. Dilihat dari sifatnya:

1. Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umunnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.

Putusan *declaratoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada

demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.

2. Putusan *constitutif*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain.

Dalam putusan *constitutif* biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Sebagai contoh amar putusan *constitutif* biasanya berbunyi sebagai berikut “Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena adanya pihak ketiga diantara mereka”

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata Penggugat yang dituntutnya terhadap Tergugat diakui oleh hakim dimuka sidang pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ada membenaran hak Penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada membenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.

Hak terhadap suatu prestasi oleh hakim dibenarkan, serta ditetapkan dalam putusan yang bersifat *condemnatoir*. Terhadap hal ini dapat dilaksanakan secara paksa (*Forcelijk executie*).

b. Dilihat dari seginya isinya

1. Niet Onvankelijk Verklaart (NO)

Niet Onvankelijk Verklaart berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- a. Gugatan tidak berdasarkan hukum
- b. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat
- c. Gugatan kabur (*obscuur libel*)
- d. Gugatan masih prematur
- e. Gugatan *Nebis In Idem*
- f. Gugatan *Error In Persona*
- g. Gugatan telah lampau waktu (*dalauwarsa*)
- h. Pengadilan tidak berwenang mengadili
- i. Gugatan dikabulkan
- j. Gugatan ditolak
- k. Gugatan didamaikan
- l. Gugatan digugurkan
- m. Gugatan dibatalkan
- n. Putusan dihentikan (*aan hanging*)

c. Dilihat dari jenisnya

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Pasal 48 dan Pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan sela yaitu:

a. Putusan Praeparatoir

Putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

b. Putusan Interlucotoir

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

c. Putusan Insedentil

Putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya dalam hal terjadi voeging, tussenkomen, prodeo, penetapan sita dan lain-lain.

d. Putusan provisi

Putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam hal ini istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah cerai,

akan tetapi sebelum itu karena suami yang digugatnya itu telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, pihak istri karena sangat membutuhkan biaya hidup, memohon kepada Majelis agar ditetapkan Nafkah yang dilalaikan oleh suaminya itu sebelum putusan akhir dijatuhkan terhadap gugutan cerai yang diajukannya.²⁷

e. Putusan akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.



²⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 307.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian Normatif, pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan pada tempat dilakukan penelitian. Penulis melakukan penelitian di Makassar pada Pengadilan Agama Kelas 1 Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus kajian pendekatan Yuridis Normatif berarti mengkaji peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-teori hukum mengenai penerapan aturan.²⁸

C. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang paling fundamental didalam melakukan penelitian, tingkat akurasi sumber data sangat berkaitan dengan hasil penelitian yang akan diraih, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau putusan hakim dan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara dalam hal ini hakim yang memutus perkara tersebut.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu penelaan literatur-literatur, jurnal, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas.²⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁸Soejono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 19801, h. 10.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h. 12.

1. Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.³⁰
2. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar mengenai nafkah terutang suami terhadap istri di Pengadilan Agama Makassar.
3. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang terkait dengan penelitian ini.

E. Instrument Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam memperoleh data hukum, sebagai berikut:

1. Buku catatan untuk mendokumentasikan hasil analisis dan data primer dan data sekunder yang telah ditulis sebelumnya diatas kertas.
2. Perangkat lunak penyimpanan bahan hukum, seperti laptop dan flashdisk, dan handphone untuk menyimpan data primer dan data sekunder yang telah dikumpul baik secara manual maupun secara online.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam bentuk primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti.

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana,2009), h. 115.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar

a. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No, 45 Tahun 1975), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu kewenangan seorang raja untuk mengangkat sorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi.

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal di kampung laras, Qadhi yang lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq an Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi yang terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu di pimpin oleh Hamante.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar, dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1975

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1975, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”, adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya diuraikan pada penjelasan berikut ini:

Wilayah Yurisdiksinya

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah kota Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (empat belas) Kecamatan.

c. Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dengan wilayah Yurisdiksi, Makassar, Gowa, Takalar, dan Maros, jumlah pegawai (SDM) sebanyak 9 orang yang waktu itu diketuai oleh K.H. chalid Husain dengan susunan personil Muh. Alwi, K.H Ahmad Ismail, M. Sholeha Matta, M. Jusuf Dg. Sitaba, Mansyur Surulle, Abd. Rahman Baluku, M. Haya dan Nisma. Hanya memiliki 7 orang personil, sedangkan sekarang ini jumlahnya telah bertambah karena berdasarkan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka penambahan jumlah pegawai (personil) sudah dinyatakan perlu guna untuk mengimbangi melonjaknya jumlah Volume perkara.

B. Nafkah Terutang Suami Pada Istri dalam Perspektif Hukum Positif

Pada pembahasan berikut ini, akan di bahas mengenai nafkah terutang suami pada istri dalam perpektif hukum positif..

Pada Hukum Positif Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa sangat jelas di atur dalam undang-undang perkawinan setelah melangsungkan pernikahan suami wajib menafkahi istrinya.

Adapun pemberian nafkah dalam hukum positif di Indonesia yaitu berlaku di Pengadilan, di atur dalam perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

2. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Pasal 80 ayat (4) yaitu: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

3. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan ke Pengadilan Agama”

Undang-Undang di Indonesia menjamin kesejahteraan istri dalam perkawinan, apabila suami melalaikan tanggungjawabnya. Ini terbukti dengan adanya pasal-pasal yang mengharuskan seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya.

Undang-Undang telah mengakomodir aturan yang berkaitan dengan rumah tangga dan melegitimasi sebagai perlindungan perempuan seperti mengharuskan suami untuk memenuhi hak-hak istri untuk dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Tetapi dalam kenyataannya sering kali suami melalaikan tanggungjawabnya kepada istri dan anak. Pada dasarnya suami lah yang semestinya menanggung

semua kebutuhan istri maupun anak selaku kepala rumah tangga. Ada juga yang melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kecukupan dan kebutuhan rumah tangga sehingga istri mengajukan atas gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri di Pengadilan Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut setelah menganalisa putusan hakim telah sesuai dengan perundang-undangan. Penulis sependapat dengan putusan tersebut, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 mengatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tetapi hakim hanya mengabulkan setengah dari gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa tergugat yang bekerja di Pertamina telah pensiun dan tidak memiliki penghasilan setiap bulannya karena tergugat bukanlah PNS yang memiliki pendapatan pensiunan tiap bulannya. dan Penggugat sebagai istri tidak memenuhi kewajibannya melayani suami

C. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 1841/Pdt.G/2016/PA Mks.

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri yang diajukan oleh:

Ny. Yeni Andriani, S.H., M.H., tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 14 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Teduh Bersinar Blok S No. 9, RT/RW: 003/022,

Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H., M.M. dan DR. Rustan, S.H., M.H. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Muhammad Iqbal, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Palapa III No. 68 Taman Telkomas Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 452/SK/IX/2016 tanggal 26 September 2016 selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Ir. Bambang Prianggono Sumadi, tempat/tanggal lahir, Malang, 13 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) Region VII Makassar, beralamat di Kompleks Kodam Pandang-Pandang, Jalan Melati V, Blok C.37 Kabupaten Gowa. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hj. Fatmawati, SH. MH. dan Ahmad Syafri Rasyid, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 514/SK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 selanjutnya disebut Tergugat I.

PT Pertamina (Persero) Pusat Jakarta, beralamat Jalan Medan Merdeka Timur No.1 A, RT.2/RW.1, Gambir, Kota Jakarta Pusat. c.q.

PT Pertamina (Persero) Region VII Makassar beralamat di Jalan Garuda No. 1 Kota Makassar. dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Wahidin Nurluzia M.
2. Mei Sugiharso
3. Lindung Nainggolan
4. Risnandar Halid
5. Budi Michael Oloan H
6. Heri Fandra
7. Pirma Joaquim Nainggolan
8. Richardo Napitupulu
9. Agi Ginanjar
10. Parjo
11. Arnold Ricky Yanrieza Dumatubun

Semuanya pekerja PT Pertamina (Persero) yang memperoleh kuasa berdasarkan Penugasan Penanganan Perkara No. 1841/Pdt.G/2016/PA Mks. oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dengan Surat Kuasa Khusus No. SK-248/C00000/ 2016-S0 tanggal 21 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar No. 516/SK/X/2016/PA Mks. tanggal 27 Oktober 2016, sebagai Tergugat II.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan perantaraan kuasanya telah mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1841/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 26 September 2016. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri sah, melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 18 Juli 1996 M, bertepatan 2 Rabiul Awal 1417 H, sesuai kutipan Akta Nikah No. 547/143/VII/1996.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, dikarunia 2 orang anak perempuan masing-masing:
 2. 1. Nanda Tiara Putri Prianggono, tempat/tanggal lahir, Makassar, 2 April 1998 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, pendidikan semester 3 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, tempat tinggal yang tetap di Jalan Teduh Bersinar Blok S No.9, RT/RW: 003/022, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
 2. 2. Ninda Berliani Putri Prianggono, tempat/tanggal lahir, Makassar, 28 Agustus 2000 (Umur 16 Tahun), Agama Islam, pendidikan : Kelas 2 pada SMAN 1 Makassar, tempat tinggal yang tetap di Jalan Teduh Bersinar Blok S No.9, RT/RW: 003/022, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa sejak terjalinnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I berjalan harmonis, hingga dikaruniai 2 orang anak. Dan dalam hal

kebutuhan hidup keluarga, Penggugat dan Tergugat I saling menopang, dimana Tergugat I sebagai karyawan Tergugat II, dan Penggugat sebagai karyawan pada Kejaksaan R.I.

4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, dimana dari tahun 1996, Tergugat I sebagai Suami dan Kepala Rumah Tangga senantiasa menunaikan kewajibannya untuk setiap bulan memberikan penghasilan (gaji) yang diperoleh dari Tergugat II, yang secara berangsur-angsur mengalami peningkatan, hingga pada mulai tahun 2005 sampai dengan Tahun 2012, Tergugat I senantiasa memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dengan mentransfer ke rekening Penggugat, dari penghasilannya (gaji) yang diperoleh dari Tergugat II tersebut.
5. Bahwa ironisnya, entah pengaruh apa tiba-tiba mulai pada bulan Januari Tahun 2013, Tergugat I sebagai suami dan kepala rumah tangga sama sekali tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dari penghasilannya yang diperoleh dari Tergugat II. Padahal Tergugat I masih aktif bekerja pada Tergugat II. Akibatnya Penggugat yang menutupi seluruh kebutuhan hidup keluarga (sandang pangan) biaya pendidikan, kesehatan, dan semua kebutuhan anak-anak lainnya.
6. Bahwa oleh karena sejak bulan Januari 2013, Tergugat I sebagai suami dan kepala rumah tangga tidak lagi menunaikan kewajibannya kepada Penggugat dan ke 2 orang anak sebagaimana fakta di atas, maka sebagai istri menanyakan

hal tersebut kepada Tergugat I, namun tidak memperoleh respon yang baik dari Tergugat I. Sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ini.

7. Bahwa berhubung pada tahun 2014, Penggugat dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dimana sebagai Penyelenggara Negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka Penggugat meminta Tergugat I untuk memberikan data yang sebenarnya terkait penghasilan setiap bulan yang diperoleh dari Tergugat II, dan sungguh mencengangkan bagi Penggugat, karena penghasilan Tergugat I yang diperoleh setiap bulan dari Tergugat II adalah sebesar Rp 28.885.101 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus satu rupiah).
8. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai diajukannya gugatan ini pada bulan September 2016 (selama 45 bulan), Tergugat I tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya setiap bulan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat dari penghasilannya yang diperoleh dari Tergugat II dengan perincian sebagai berikut:

$$45 \text{ bulan} \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp. } 675.000.000 \text{ (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).}$$

Dengan demikian, kewajiban Tergugat I yang tidak ditunaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 675.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa berhubung tidak adanya itikad baik Tergugat I memberikan hak atas nafkah kepada Penggugat di atas, maka ketika Penggugat memperoleh

informasi bahwa Tergugat I akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena usia pensiun pada Oktober 2016, dimana Tergugat I akan memperoleh pesangon sebesar Rp.1.680.000.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Maka pada tanggal 9 Juni 2015, Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat II, agar pesangon yang akan diperoleh Tergugat I ditangguhkan untuk sementara waktu, namun Tergugat II justru mengesampingkan permintaan Penggugat, karena Tergugat II tetap saja mencairkan dan memberikan pesangon 90 % sebesar Rp 1.512.000.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah) kepada Tergugat I dari total pesangon yang akan diterima tersebut, sehingga tersisa pesangon 10 % sebesar 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang belum dicairkan oleh Tergugat II. Padahal sesungguhnya Tergugat II telah mengetahui seluk beluk kondisi Tergugat I, karena ketika Tergugat II menindaklanjuti Surat Keberatan Penggugat ajukan, dimana pada hari Jum'at, 19 Juni 2015 Tergugat II telah meminta keterangan Penggugat sesuai Surat Panggilan dan Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 19 Juni 2015.

10. Bahwa pesangon 90 % yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II sebesar Rp 1.512.000.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah), dimana Tergugat I sama sekali tidak memberikan hak nafkah kepada Penggugat, dalam arti bahwa pesangon 90 % yang telah diterima Tergugat I semuanya dipergunakan untuk keperluan pribadi Tergugat I. Padahal menurut hukum Tergugat I sebagai suami dan kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk

memberikan hak nafkah kepada Penggugat sebagai Istri dan ibu rumah tangga serta ke 2 orang anak.

11. Bahwa berhubung masih ada sisa pesangon 10 % sebesar 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) yang belum dicairkan dan belum diserahkan Tergugat II kepada Tergugat I, lantas dikaitkan dengan perilaku Tergugat I yang tidak sama sekali menunaikan kewajibannya satu senpun kepada Penggugat ketika menerima pesangon 90 % sebesar Rp 1.512.000.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah). Dengan demikian, berdasar hukum kiranya diletakkan *Sita Jaminan* atas pesangon 10% sebesar 168.000.000 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa selama perkawinan tidak putus, maka kewajiban suami (Tergugat 1) memberikan nafkah kepada istri (Penggugat) adalah imperatif sebagai konsekwensi hukum dari akad nikah, dengan demikian maka pemberian nafkah istri yang tidak dilaksanakan, menjadi nafkah terutang.

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah istri merupakan sebuah tanggung jawab yang dipikul oleh suami dalam kapasitasnya sebagai kepala rumah tangga, yang apabila dilalaikan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari sistem hukum perkawinan.

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Menimbang bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) adalah tidak tepat. Dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah jelas yaitu Tergugat I telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 45 bulan, dan Penggugat di dalam petitumnya menuntut agar Tergugat I memberikan dan atau memenuhi kewajibannya tersebut.

Menimbang Petitum gugatan angka 4 (empat) dan 6 (enam) yang mengaitkan kewajiban memberikan nafkah anak, bahwa gugatan Penggugat hanya mengatasnamakan diri Penggugat saja atau tidak mengatasnamakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan, di dalam Surat Kuasa Khusus juga para penerima kuasa tidak mewakili kepentingan anak-anak Penggugat – Tergugat I. Oleh karena itu segala prestasi yang dituntut kepada Tergugat I terhadap anak-anaknya, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangan gugatan Penggugat menyangkut tuntutan pesangon Tergugat I, karena sejak semula gugatan Penggugat bermuatan tuntutan pemberian nafkah, dan tidak menjadi persoalan dari mana sumber nafkah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa perkara gugatan nafkah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang perinciannya tersebut pada bagian akhir putusan ini.

Mengingat, Pasal 311 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura).

Mengingat, Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam *junto* Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika suami tidak memenuhi kebutuhan istri baik makanan, minuman, atau pakaian, padahal ia mampu, maka boleh bagi sang istri mengambil harta suaminya tanpa mendapat izin darinya, tetapi yang diambil hanya sekedar nafkah yang cukup buat keluarga dengan secara patut tidak boleh berlebihan, hal ini didasari oleh sebuah hadits dari Aisyah beliau berkata;

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Bahwasanya Hindun bintu ‘Itbah berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak- anakku, kecuali aku harus mengambilnya sedangkan dia tidak tahu,’ maka (Rasulullah) mengatakan, ‘ambillah apa yang cukup buatmu dan anak- anakmu dengan cara yang patut.’ (HR.Bukhori 4945).

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim dan segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menyatakan Tergugat I melalaikan kewajiban dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2013 sampai bulan September 2016 atau selama 45 bulan.
3. Menyatakan kelalaian Tergugat I sebagaimana tersebut dalam amar poin 2 merupakan nafkah terutang bagi Tergugat I kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I untuk memberikan nafkah terutang kepada Penggugat sejumlah Rp 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.596.000,00 (Dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. dan Dra. Hj. Mardianah Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

1. Analisis

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dipenegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, hukum yang adil

tentu saja dibutuhkan kejelian dalam memutus perkara sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan objektif serta didasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

Menurut penulis, setelah dilangsungkannya pernikahan sudah seharusnya seorang suami atau kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yang sangat besar untuk melindungi dan menafkahi istri. Suami adalah panutan dari keluarganya. Seharunya seorang suami bekerja hanya untuk menghidupi kebutuhan istri dan keluarganya dan suami sebagai kepala rumah tangga memberikan hal yang pantas untuk membahagiakan istri. Namun masih ada suami yang melalaikan tanggungjawabnya seperti tidak memiliki kewajiban sama sekali terhadap istri. .

Menurut Penulis, sudah di atur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Seorang suami yang bertanggungjawab semestinya memberikan hak istri gaji suami sepenuhnya karena istrilah memiliki peranan penting didalam sebuah keluarga untuk mengurus semua kebutuhan rumah tangga.

Menurut penulis, jika suami melalaikan kewajibannya istri dapat menuntut ke Pengadilan Agama agar mendapatkan haknya, supaya suami tidak semenah-menah menelantarkan istrinya. Dan Penggugat tidak boleh mengaitkan gugatan nafkah anak, karena itu sudah kewajiban suami istri untuk menafkahi anaknya dan gugatan ini hanya kepada dirinya sendiri sebagai Penggugat.

Menurut penulis, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pertamina (Tergugat II) seharusnya tidak pantas, karena penggugat tidak memiliki hak sama sekali untuk mengintervensi hubungan kerja yang dilakukan secara profesional antara Tergugat I dan Tergugat II dalam soal pengupahan dan pemberian uang pesangon, karena hubungan kerja yang terjadi hanyalah antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pimpinan Perusahaan, kemudian dari pada itu pemberian upah dan pesangon oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan

Menurut penulis, nominal penghasilan yang digugat istri rendah, karena gaji sang suami besar. Dan menurut penulis, putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian itu rendah, karena selama suami bekerja memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya dengan gaji yang cukup besar. Dan penulis sependapat dengan menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat II dan selebihnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian Nafkah terutang Suami terhadap istri sudah ada diatur dalam Hukum Positif .
Hukum Pemberian Nafkah terhadap istri sangat jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 tentang Perkawinan berbunyi:
 - (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
 - (3) Jika suami atau istri melakukan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
2. Terhadap istri dalam putusan No.1841/Pdt.G/2016/PA.Mks adalah semetinya putusan hakim menghukum tergugat lebih besar dan lebih tinggi lagi nominalnya dari apa yang telah di putuskan oleh majelis hakim. Karena pertimbangan selama ini nominal gaji Tergugat I sangat besar.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang enggan melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Sebab perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum menjamin terpenuhinya hak istri dan keperluan anak-anaknya jika suami telah melalaikan kewajibannya.
2. Hendaklah langkah-langkah hukum yang dilakukan adalah langkah-langkah yang efektif dan efisien serta memberi keadilan kepada pihak termasuk dalam hal ini pemohon oleh istri untuk menuntut haknya dari kelalaian suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, .Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ctk, 9: Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers 2011.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinandi Indonesia* Yogyakarta: Bina Cipta 1976.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*. cet1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga*. Terj. Nur Khozin. cet 1; Jakarta: Amzah, 2010.
- Pabbu, Amiruddin dan Rahman Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Aldgensido, 1986.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasn lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*. Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafindo, 1995.
- Supriadi, Dedi. *fiqih Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Basyir, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gadjah mada University Pers, 1977.

Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Tihami. *Fiqih Munakat Kajian fiqih nikah lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Fuadi, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. cet V; Jakarta: Kencana, 2008.

Soekarno, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1981.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<https://media.neliti.com/media/publications/34349-ID-pelaksanaan-kewajiban-pemeliharaan-anak-alimentasi-oleh-orang-tua-pasca-putusan.pdf>,
pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 22:30.

www.hukumonline.com pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 22:10.



RIWAYAT HIDUP

Hanifah Alya lahir di Sungguminasa pada tanggal 22 Mei 1996, Anak ke satu dari tiga bersaudara, anak dari Andi Patonangi dan Hj. Rosdiana. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri Mangasa I dan tamat pada tahun 2008.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2011, lalu melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2014 dan mengikuti ekstrakurikuler Pramuka.

Setelah menyelesaikan pengabdian, penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2014, dan menyelesaikan studi pada tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R